

# Kajian Kinerja Kebijakan Program Agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

F. K. Siahaan<sup>1</sup>, M. Mukhtali<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Diponegoro, Indonesia

## Article Info:

Received: 17 December 2020

Accepted: 2 February 2022

Available Online: 17 February 2022

## Keywords:

Performance, Agropolitan Program Sumowono District and Bandungan District

## Corresponding Author:

Florence Kristianti Siahaan  
Diponegoro University,  
Semarang, Indonesia

Email:

[florencekristianti@yahoo.com](mailto:florencekristianti@yahoo.com)

**Abstract:** Sumowono and Bandungan sub-districts are parts of Semarang Regency which are designated as one of the rural developments through the agropolitan concept. The agropolitan program was established in 2003 with the aim of improving the welfare and standard of living of the community. In practice, conditions for agropolitan programs in the region are not developing optimally or are stagnant. This was conveyed according to the Central Java Province Regional Planning and Development Agency. Then, based on the report from Bappeda of Central Java Province, it shows that the agropolitan development of Semarang Regency is lagging behind that of Pemalang, Temanggung, Magelang, Brebes, Purworejo, and Karanganyar Regencies. This is because agropolitan activities only focus on land production activities (on farm). Seeing the stagnant agropolitan development, a review of the performance of agropolitan program policies was conducted in Sumowono and Bandungan districts. This study aims to examine the performance of policies in the agropolitan system in Sumowono and Bandungan districts. The results of the analysis above, it can be seen that the performance of the agropolitan program in Sumowono and Bandungan districts is in the quite successful category. This can be seen from the downstream agribusiness subsystem in the two districts which is included in the low category. The downstream agribusiness subsystem score in Sumowono District was 45.09 and Bandungan District was 49.03. This is because the knowledge and skills of farmer groups in utilizing technology for promotion and preservation are still low and marketing reach is still at the provincial level. Thus, the competitiveness of agricultural production in Sumowono and Bandungan Districts is still low.

Copyright © 2016 JTPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

## How to cite (APA 6th Style):

Siahaan, F. K., & Mukhtali, M. (2022). Kajian Kinerja Kebijakan Program Agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 11(1), 32–40.

## 1. PENDAHULUAN

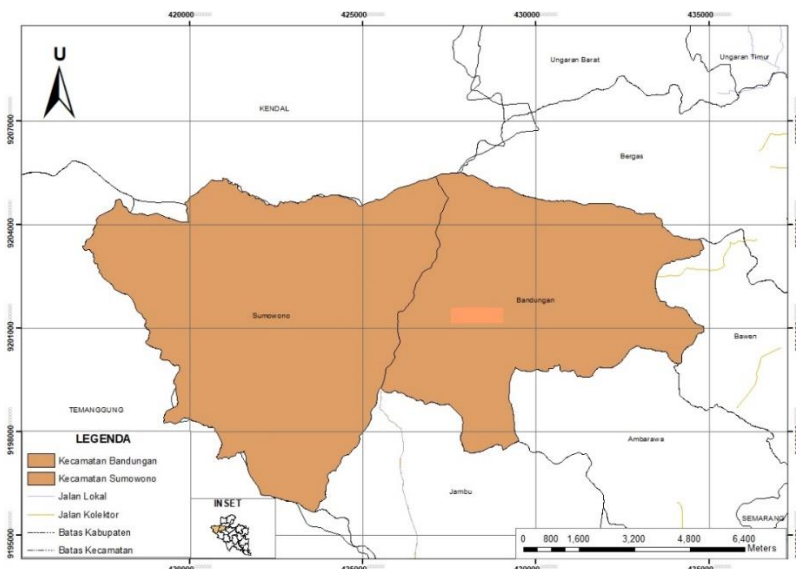
Pada tahun 2002, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian mengeluarkan program agropolitan sebagai perwujudan pemerataan pembangunan antara perkotaan dengan pedesaan yang mengalami kesenjangan. Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi lokal di kawasan pedesaan, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Agropolitan merupakan jenis konsep pembangunan *bottom up* yang bertujuan untuk membangun ekonomi berbasis pertanian, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta untuk melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian (Fatkhianti et al., 2015). Pengembangan agropolitan tidak hanya berfokus pada usaha budidaya tani saja, namun juga dilakukan kegiatan agribisnis. Agribisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian, meliputi salah satu keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi, pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan (Agustina & Artiningsih, 2017). Kegiatan agribisnis merupakan kegiatan perekonomian utama, dimana pendapatan sebagian besar masyarakat akan diperoleh melalui kegiatan agribisnis.

Kegiatan agribisnis tersebut juga harus didukung dengan manajemen logistik yang lebih baik sehingga membantu bisnis yang berdaya saing (Zen & Dwiyantoro, 2014). Penerapan strategi teknis dan bisnis berupa pengetahuan teknis antara pengolah juga penting untuk meningkatkan nilai ekonomi (Saleh et al., 2014). Pengembangan bisnis dengan dukungan wirausaha merupakan strategi terbaik dalam pengembangan ekonomi pedesaan (Rădulescu et al., 2014). Strategi-strategi tersebut memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam langkah pengembangan agropolitan untuk memastikan bahwa program agropolitan berjalan dengan baik karena program agropolitan cukup kompleks terutama dalam perencanaan dan implementasinya (Shaffril, Nasir, Idris, Uli & D'Silva dalam (Agustina & Artiningsih, 2017).

Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah yang melakukan pengembangan pedesaan melalui konsep agropolitan. Pada tahun 2003, pemerintah daerah menetapkan Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan sebagai kawasan agropolitan. Menurut Bappeda Provinsi Jawa Tengah, perkembangan agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan tidak mengalami perkembangan yang optimal atau mengalami stagnan. Hal tersebut terlihat dari kontribusi sektor pertanian yang diberikan oleh kedua kecamatan terhadap PDRB Kabupaten Semarang mengalami penurunan tiap tahun. Selain itu, berdasarkan laporan Bappeda Provinsi Jawa Tengah perkembangan agropolitan di Kabupaten Semarang mengalami ketertinggalan dari Kabupaten Pemalang, Temanggung, Magelang, Boyolali, Brebes, Purworejo, dan Karanganyar. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kegiatan agropolitan yang berfokus pada kegiatan produksi lahan (*on farm*) dan belum melakukan kegiatan off farm. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia di kedua kecamatan juga masih terbilang rendah. Sehingga kemampuan masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah produksi tani juga kurang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah bagaimana kinerja kebijakan program agropolitan pada sistem agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan. Sehingga dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja kebijakan program agropolitan pada sistem agropolitan melalui faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik.

Wilayah yang akan dilakukan penelitian terdiri dari dua, yaitu kawasan agropolitan di Kecamatan Sumowono dan kawasan agropolitan di Kecamatan Bandungan. Luas wilayah Kecamatan Sumowono sebesar 5.562,99 ha dan Kecamatan Bandungan sebesar 4.823,33 ha. Kedua wilayah tersebut didominasi oleh lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam, sehingga kedua wilayah tersebut terkenal sebagai penghasil sayur mayur, tanaman hias, dan kopi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah wilayah studi penelitian.

**Gambar 1.** Peta Wilayah Studi (Analisis, 2020)



## 2. DATA DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis skoring dan pembobotan pada variabel yang telah ditentukan melalui kajian literatur. Bobot masing-masing variabel yang telah ditentukan adalah sama besar. Skor yang digunakan yaitu antara 1-3, dimana skor dari masing-masing agropolitan di kedua kecamatan ditotal dan dicari reratanya untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh. Teknik analisis skoring dalam penelitian ini memiliki interval skor sebesar 22,23%. Perhitungan skoring memiliki rincian dengan persamaan sebagai berikut.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada kelompok tani yang ada di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan. Jumlah anggota kelompok tani di Kecamatan Sumowono sebesar 5.823 jiwa dan jumlah anggota kelompok tani di Kecamatan Bandungan sebesar 5.820 jiwa. Dalam penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. Hasil perhitungan jumlah sampel melalui rumus slovin didapat sebesar 98 sampel pada setiap masing-masing kecamatan.

Variabel penelitian berupa aspek isi kebijakan, komunikasi antar instansi, sumberdaya manusia dan materi, serta kapabilitas dan sikap pelaksana tersebut disusun ke dalam sistem kegiatan agropolitan yang terdiri dari beberapa kriteria pada masing-masing aspek. Kriteria tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan penerapan dari program agropolitan.

Masing-masing aspek tersebut digunakan untuk menganalisis diantaranya: (1) Isi Kebijakan, terdiri dari pelaksana program, manfaat yang diterima, sumberdaya yang memadai, serta kejelasan dan konsistensi kebijakan; Komunikasi Antar Instansi, merupakan koordinasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan; Sumberdaya Manusia dan Materi, terdiri dari pelaksana program yang memadai, pendanaan, dan fasilitas pendukung program agropolitan; Kapabilitas dan Sikap Pelaksana merupakan kompetensi, keterampilan serta komitmen dari pelaksana dalam melaksanakan program agropolitan. Deskripsi tersebut merupakan landasan dalam penyusunan kriteria bagi masing-masing aspek (tabel 1)

**Tabel 1.** Kriteria Penilaian (Analisis, 2020)

Komponen	Sub Variabel	Indikator
Subsistem agribisnis hulu	Sumberdaya kebijakan agropolitan	Adanya bantuan benih dan peralatan pengolahan pertanian
Subsistem usaha tani	Staf Memadai	Memiliki pengetahuan teknis dan keterampilan, serta mampu bekerjasama dan berkomunikasi
	Memiliki pengetahuan akan program agropolitan Komitmen pelaksana terhadap program agropolitan	Memahami manfaat dan strategi pemasaran agropolitan Sikap pelaksana profesional, disiplin, bekerja dengan cepat dan tepat
Subsistem agribisnis hilir	Memiliki keterampilan teknis dan manajerial	Inovasi produk lewat pengemasan menarik, promosi media online, dan pengawetan
	Kompetensi pelaksana	Memanfaatkan teknologi dalam segi pemasaran dan pengolahan
	Kualitas peningkatan pasar	Tingkat pemasaran skala internasional
Subsistem jasa-jasa pendukung	Manfaat kebijakan agropolitan Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan	Adanya manfaat yang diterima dari program agropolitan
	Pelaksana kebijakan agropolitan	Pelaksana program agropolitan dijelaskan secara detail
	Sumberdaya kebijakan agropolitan	Ketetapan alokasi anggaran dan pembagian fungsi tugas
	Kejelasan dan konsisten kebijakan agropolitan	Kebijakan agropolitan jelas dan rinci
	Komunikasi antar pemangku kepentingan	Pertemuan antar pelaksana program
	Kerjasama dengan pelaksana	Ikut serta pelatihan dan penyuluhan pertanian
	Kerjasama dengan swasta	Bantuan dana dan fasilitas pendukung agropolitan
	Sosialisasi program agropolitan pada masyarakat	Sosialisasi kegiatan penyuluhan dan pemasaran
	Pemantauan dan pengendalian pelaksana program agropolitan	Pemantauan dan pengendalian secara langsung oleh Dinas Pertanian dan BPP
	Bantuan dana dari pemerintah daerah	Bantuan dana pemerintah rutin tiap bulan
	Ketetapan alokasi anggaran	Tersedia ketetapan alokasi anggaran tiap tahun
Bantuan dana dari pihak swasta	Bantuan dana swasta rutin tiap tahun	
Kondisi fasilitas stasiun terminal agribisnis	Fasilitas penyimpanan, pnegemasan, ruang parkir	
dari pemerintah	berfungsi dengan baik dan mudah dijangkau	
Kemauan pelaksana untuk berpartisipasi	Program dirasa sangat efektif dan efisien dalam membantu kondisi ekonomi masyarakat	

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Subsistem Agribisnis Hulu (*Up Stream Agribusiness*)

Subsistem agribisnis hulu merupakan penyedia barang modal berupa bibit dan peralatan pengolahan pertanian (Basuki et al., 2012). Sejalan dengan pernyataan tersebut, program agropolitan dalam pelaksanaannya memberikan bantuan pada kelompok tani untuk keberlangsungan dalam kegiatan agropolitan. Jenis bantuan yang diterima ini kemudian dianalisis berdasarkan dua kriteria yang telah ditetapkan (Merilee Grindle dalam (Subarsono, 2012) ).

**Tabel 2.** Hasil Analisis Subsistem Agribisnis Hulu (Analisis, 2020)

	Lokasi	Sub Variabel	Kriteria	Frekuensi Per Skor			Total Pembobotan	Kriteria skor
				1	2	3		
Subsistem Agribisnis Hulu ( <i>Up Stream Agribusiness</i> )	Bandungan	Bantuan benih	Adanya bantuan benih	40	0	58	214	Sedang
		Bantuan peralatan pengolahan pertanian	Adanya bantuan peralatan pengolahan pertanian	23	0	75	248	
		<b>Skor Subsistem Agribisnis Hulu Kecamatan Bandungan</b>						
	Sumowono	Bantuan benih	Adanya bantuan benih	22	0	76	250	Sedang
		Bantuan peralatan pengolahan pertanian	Adanya bantuan peralatan pengolahan pertanian	21	0	77	252	
		<b>Skor Subsistem Agribisnis Hulu Kecamatan Sumowono</b>						

Kriteria pertama yaitu adanya bantuan benih, menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok tani mendapatkan bantuan benih dalam melaksanakan program agropolitan. Sama halnya dengan kriteria kedua yaitu adanya bantuan peralatan pengolahan pertanian, menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok tani mendapatkan bantuan peralatan pengolahan pertanian dalam melaksanakan program agropolitan. Peralatan pengolahan pertanian yang diterima berupa traktor, cultivator dan alat angkut roda tiga. Satu mesin peralatan tersebut diperoleh satu kelompok tani, dimana alat tersebut akan dipinjam oleh para petani secara bergiliran. Berdasarkan hasil tersebut didapat bahwa jenis bantuan yang diterima di kedua kecamatan termasuk dalam kategori sedang.

#### Subsistem Usaha Tani (*On Farm Agribusiness*)

Subsistem usaha tani merupakan kegiatan yang menghasilkan komoditas pertanian berupa tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Basuki et al., 2012). Dalam hal ini, pelaku dari komponen subsistem ini adalah petani. Subsistem tersebut dianalisis melalui karakteristik dan kapabilitas pelaksana program agropolitan (G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono, 2015).

Dalam subsistem tersebut terdapat tiga kriteria (Tabel. 3), dimana kriteria yang memiliki total pembobotan paling besar adalah memiliki pengetahuan teknis dan keterampilan, serta mampu bekerjasama dan berkomunikasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa kelompok tani cukup memahami budidaya tanaman, kelompok tani cukup terampil dalam budidaya tanaman serta kemampuan kelompok tani bekerja dengan tepat.

#### Subsistem Agribisnis Hilir (*Down Stream Agribusiness*)

Subsistem agribisnis hilir merupakan kegiatan pengolahan hasil produk tani menjadi produk olahan serta distribusi hasil produk ke konsumen (Basuki et al., 2012). Subsistem ini dinilai dari kualitas peningkatan pasar (Departemen Pekerjaan Umum, 2012) dan keterampilan teknis pelaksana

program (G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Subarsono, 2015). (Tabel. 4)

**Tabel 3.** Hasil Analisis Subsistem Usaha Tani (Analisis, 2020)

Subsistem Usaha tani ( <i>On Farm Agribusiness</i> )	Lokasi	Sub Variabel	Kriteria	Frekuensi Per Skor			Total Pembobotan	Kriteria skor
				1	2	3		
Bandungan		Staf memadai	Memiliki pengetahuan teknis dan keterampilan, serta mampu bekerjasama dan berkomunikasi	33	246	15	570	<b>Sedang</b>
		Memiliki pengetahuan kebijakan agropolitan	Memahami manfaat dan strategi pemasaran agropolitan	85	104	7	314	
		Komitmen pelaksana	Sikap pelaksana profesional, disiplin, bekerja dengan cepat dan tepat	6	51	41	231	
<b>Skor Subsistem Usaha tani Kecamatan Bandungan</b>							<b>63,21</b>	
Sumowono		Staf memadai	Memiliki pengetahuan teknis dan keterampilan, serta mampu bekerjasama dan berkomunikasi	98	174	22	512	<b>Sedang</b>
		Memiliki pengetahuan kebijakan agropolitan	Memahami manfaat dan strategi pemasaran agropolitan	85	88	23	330	
		Komitmen pelaksana	Sikap pelaksana profesional, disiplin, bekerja dengan cepat dan tepat	11	30	57	242	
<b>Skor Subsistem Usaha tani Kecamatan Sumowono</b>							<b>61,45</b>	

**Tabel 4.** Hasil Analisis Subsistem Agribisnis Hilir (Analisis, 2020)

Subsistem Agribisnis Hilir ( <i>Down Stream Agribusiness</i> )	Lokasi	Sub Variabel	Kriteria	Frekuensi Per Skor			Total Pembobotan	Kriteria skor
				1	2	3		
Bandungan		Kualitas peningkatan pasar	Tingkat pemasaran skala internasional	77	84	35	350	<b>Rendah</b>
		Memiliki keterampilan teknis dan manajerial	Inovasi produk lewat pengemasan menarik, promosi media online, dan pengawetan	223	41	30	395	
		Kompetensi pelaksana	Memanfaatkan teknologi dalam segi pemasaran dan pengolahan	139	46	11	264	
<b>Skor Subsistem Agribisnis Hilir Kecamatan Bandungan</b>							<b>49,03</b>	
Sumowono		Kualitas peningkatan pasar	Tingkat pemasaran skala internasional	70	98	28	350	<b>Rendah</b>
		Memiliki keterampilan teknis dan manajerial	Inovasi produk lewat pengemasan menarik, promosi media online, dan pengawetan	266	14	14	336	
		Kompetensi pelaksana	Memanfaatkan teknologi dalam segi pemasaran dan pengolahan	156	34	6	242	
<b>Skor Subsistem Agribisnis Hilir Kecamatan Sumowono</b>							<b>45,09</b>	

Kriteria pertama yaitu kualitas peningkatan pasar menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok

tani menjual hasil produk tani melalui Pasar Bandungan/ Jimbaran/ Sumowono dibandingkan dengan Sub Terminal Agribisnis Jetis. Hal tersebut dikarenakan biaya sewa kios yang mahal dan adanya batasan waktu pemasaran. Kemudian untuk jangkauan pemasaran produksi, rata-rata masih dalam skala pemasaran tingkat provinsi, yaitu Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Rembang.

Kriteria kedua yaitu inovasi produk lewat pengemasan menarik, promosi, media online dan pengawetan menunjukkan bahwa kriteria tersebut masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari sebagian besar kelompok tani yang belum melakukan inovasi pengemasan. Sama halnya dengan kriteria ketiga yaitu memanfaatkan teknologi dalam segi pemasaran dan pengolahan yang menunjukkan bahwa kriteria tersebut masih tergolong rendah juga. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan kelompok tani akan teknologi. Hasil penelitian membuktikan bahwa kegiatan agropolitan yang dilakukan oleh kedua kecamatan masih berfokus pada kegiatan produksi lahan (*on farm*) dan belum melakukan kegiatan nilai tambah bagi produk pertanian (*off farm*).

### Subsistem Jasa-jasa Pendukung

Subsistem jasa-jasa pendukung merupakan penyedia jasa bagi kegiatan agribisnis seperti perbankan, infrastruktur, penyuluhan, dan kebijakan pemerintah (Basuki et al., 2012). Subsistem tersebut dinilai dari isi kebijakan (Merilee Grindle dalam Subarsono, 2015), komunikasi antar instansi dan fasilitas pendukung (Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subarsono, 2015) dan pendanaan George C. Edwards III dalam Subarsono, 2015). Salah satu bentuk pendanaan adalah kebijakan fiskal melalui kebijakan pajak. menurut Hall dan Jorgenson dalam (Rosdiana et al., 2014) menyatakan bahwa bentuk kredit pajak secara langsung dapat memengaruhi beban pajak dibandingkan bentuk insentif lain yang hanya mengurangi penghasilan kena pajak.

**Tabel 5.** Hasil Analisis Subsistem Jasa-jasa Pendukung (Analisis, 2020)

Subsistem Jasa-Jasa Pendukung	Lokasi	Sub Variabel	Kriteria	Frekuensi Per Skor			Total Pembobotan	Kriteria skor
				1	2	3		
	Bandungan	Manfaat kebijakan agropolitan Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan	Adanya manfaat yang diterima dari program agropolitan	33	64	1	164	Sedang
		Pelaksana kebijakan agropolitan	Pelaksana program agropolitan dijelaskan secara detail	11	16	71	256	
		Kinerja pihak BPP	Pembagian fungsi tugas yang jelas	17	68	13	192	
		Kejelasan dan konsisten kebijakan agropolitan	Kebijakan agropolitan jelas dan rinci	21	70	7	182	
		Komunikasi antar pemangku kepentingan Kerjasama dengan pelaksana	Pertemuan antar pelaksana program ikut serta pelatihan dan penyuluhan pertanian	9	125	62	445	
		Kerjasama dengan swasta	Bantuan dana dan fasilitas pendukung agropolitan	16	157	23	399	
		Sosialisasi program agropolitan pada masyarakat	Sosialisasi kegiatan penyuluhan dan pemasaran	87	7	4	113	
		Pemantauan dan pengendalian pelaksana program agropolitan	Pemantauan dan pengendalian secara langsung oleh Dinas Pertanian dan BPP	34	138	24	382	
		Bantuan dana dari pemerintah	Bantuan dana pemerintah rutin	27	125	44	409	
		Ketetapan alokasi anggaran	Tersedia ketetapan alokasi anggaran tiap tahun	95	84	17	314	
				74	77	45	363	



	Bantuan dana dari swasta	Bantuan dana dari pihak swasta rutin tiap tahun	89	9	0	107	
	Kondisi fasilitas stasiun terminal agribisnis dari pemerintah	Fasilitas penyimpanan, pengemasan, ruang parkir, berfungsi dengan baik dan mudah dijangkau	44	170	80	624	
	Kemauan pelaksana untuk berpartisipasi	Program dirasa sangat efektif dan efisien dalam membantu kondisi ekonomi masyarakat	7	75	16	205	
<b>Skor Substitem Jasa-Jasa Pendukung Kecamatan Bandungan</b>						<b>64,24</b>	
Sumowono	Manfaat kebijakan agropolitan Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan	Adanya manfaat yang diterima dari program agropolitan	49	48	1	148	<b>Sedang</b>
	Pelaksana kebijakan agropolitan	Pelaksana program agropolitan dijelaskan secara detail	2	19	77	271	
	Kinerja pihak BPP	Pembagian fungsi tugas yang jelas	5	88	5	196	
	Kejelasan dan konsisten kebijakan agropolitan	Kebijakan agropolitan jelas dan rinci	9	87	2	189	
	Komunikasi antar pemangku kepentingan	Pertemuan antar pelaksana program	7	140	49	434	
	Kerjasama dengan pelaksana	Ikut serta pelatihan dan penyuluhan pertanian	15	149	32	409	
	Kerjasama dengan swasta	Kerjasama dengan swasta	98	0	0	98	
	Sosialisasi program agropolitan pada masyarakat	Sosialisasi kegiatan penyuluhan dan pemasaran	26	144	26	392	
	Pemantauan dan pengendalian pelaksana program agropolitan	Pemantauan dan pengendalian secara langsung oleh Dinas Pertanian dan BPP	15	124	57	434	
	Bantuan dana dari pemerintah	Bantuan dana pemerintah rutin	94	97	5	303	
	Ketetapan alokasi anggaran	Tersedia ketetapan alokasi anggaran tiap tahun	100	85	11	303	
	Bantuan dana dari swasta	Bantuan dana dari pihak swasta	91	5	2	107	
	Kondisi fasilitas stasiun terminal agribisnis dari pemerintah	Fasilitas penyimpanan, pengemasan, ruang parkir, berfungsi dengan baik dan mudah dijangkau	52	119	123	659	
	Kemauan pelaksana untuk berpartisipasi	Program dirasa sangat efektif dan efisien dalam membantu kondisi ekonomi masyarakat	22	50	26	200	
<b>Skor Substitem Jasa-Jasa Pendukung Kecamatan Sumowono</b>						<b>64,05</b>	

Kriteria kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa kriteria tersebut tergolong cukup baik. Hal tersebut terlihat dari pelaksana program dijelaskan secara detail, pembagian fungsi tugas yang jelas, serta kejelasan dan konsistensi kebijakan cukup baik. Kriteria fasilitas penyimpanan, pengemasan dan ruang parkir STA Jetis memiliki kondisi yang baik. Hal tersebut terlihat dari ruang penyimpanan dan ruang parkir berfungsi dengan baik serta ruang pengemasan yang luas dan mudah dijangkau. Kemudian untuk kriteria sosialisasi kegiatan pelatihan dan pemantauan serta pengendalian tergolong kurang baik. Hal tersebut dikarenakan kedua kegiatan tersebut jarang dilakukan atau hanya dilakukan saat dibutuhkan saja. Sama halnya dengan kriteria bantuan dana dari pemerintah dan ketetapan alokasi anggaran tergolong kurang rendah. Hal ini dikarenakan bantuan dana dari

pemerintah tidak dilakukan secara rutin, dimana bantuan dana yang diterima oleh kelompok tani terakhir kali tahun 2012 dengan dana seratus juta.

Berdasarkan hasil analisis skoring masing-masing variabel yang telah dilakukan, maka selanjutnya dilakukan rekapitulasi skoring. Hasil analisis skoring pada **Tabel 6** menunjukkan bahwa penerapan program agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan cukup berhasil melalui peran yang diberikan oleh kelompok tani, khususnya pada kriteria subsistem agribisnis hulu dan agribisnis jasa-jasa pendukung.

Subsistem agribisnis hulu menunjukkan bahwa subsistem tersebut memiliki rerata paling tinggi, yaitu 81,97. Artinya, subsistem tersebut merupakan faktor yang memengaruhi implementasi program agropolitan. Kemudian, rerata subsistem agribisnis hilir adalah yang paling rendah, yaitu 47,06. Rendahnya subsistem tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman kelompok tani terhadap teknologi promosi dan pengawetan. Sehingga daya saing dan kualitas hasil produk tani belum dapat diandalkan karena belum melakukan kegiatan pengolahan dan pengemasan yang menarik (*brand pribadi*).

**Tabel 6.** Rekapitulasi Skoring Agropolitan (Analisis, 2020)

No	Komponen	Kecamatan Bandungan	Kecamatan Sumowono	Rerata
1	Subsistem Agribisnis Hulu (Bobot 25%)	78,57	85,37	81,97
2	Subsistem Usaha Tani (Bobot 25%)	63,21	61,45	62,33
3	Subsistem Agribisnis Hilir (Bobot 25%)	49,03	45,09	47,06
4	Subsistem Jasa-Jasa Pendukung (Bobot 25%)	64,24	64,05	64,15
<b>Jumlah Skor (Total 100%)</b>		63,76 (Cukup Berhasil/Sedang)	63,99 (Cukup Berhasil/Sedang)	

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengkaji kinerja kebijakan program agropolitan pada sistem agropolitan di Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Bandungan, dapat disimpulkan bahwa program agropolitan sudah diterapkan cukup berhasil. Hal ini terlihat dari bantuan benih dan peralatan pengolahan pertanian yang diterima oleh kelompok tani serta jasa-jasa pendukung (fasilitas STA, kebijakan pemerintah, kegiatan penyuluhan) yang cukup baik.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Pertama, perlu adanya kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang terjadwal serta melakukan praktek dalam budidaya tanaman dan strategi pemasaran. Kedua, pengembangan sumberdaya kelompok tani melalui pelatihan yang berkaitan dengan cara pengemasan, pengawetan, dan promosi agar meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian. Terakhir, upaya pengenalan terhadap teknologi

#### 5. REFERENSI

- Agustina, I., & Artiningsih, A. (2017). Evaluasi Implementasi Masterplan Kawasan Agropolitan Ciwidey Menggunakan Logic Models. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.14710/jwl.5.1.1-10>
- Basuki, A. T., Ekonomi, F., Muhammadiyah, U., & Selatan, J. L. (2012). *Pengembangan kawasan agropolitan*. 13(April), 53–71.



- Fatkhiati, S., Tjiptoherijanto, P., Rustiadi, E., & Thayib, Moh. H. (2015). Sustainable Agropolitan Management Model in the Highland of Tropical Rainforest Ecosystem: The Case of Selupu Rejang Agropolitan Area, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 28(Sustain 2014), 613–622. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.072>
- Rădulescu, E., Marian, L., & Moica, S. (2014). Innovations and Opportunities for Entrepreneurial Rural Developments. *Procedia Economics and Finance*, 15(14), 1495–1500. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00616-9](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00616-9)
- Rosdiana, H., Inayati, & Murwendah. (2014). Evaluation of Fiscal Policy on Agropolitan Development to Raise Sustainable Food Security (A Study Case in Bangli Regency, Kuningan Regency and Batu Municipality, Indonesia). *Procedia Environmental Sciences*, 20, 563–572. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.069>
- Saleh, K., Elena, S., & Khalil, H. M. (2014). Egyptian Research for Agriculture Rural Development Today. *Procedia Economics and Finance*, 8(14), 683–687. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00145-2](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00145-2)
- Subarsono, A. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Zen, T. S., & Dwiyanoro, P. (2014). Commerce Systems and Distribution Pattern Commodities Principal and Featured (A Case Study in Ciamis District, West Java Province, Indonesia). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 115(Iclics 2013), 34–43. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.413>